



Bahas APBD Perubahan 2015

Dewan Jadwalkan Panggil Seluruh SKPD

Singaraja (Bali Post) -

Setelah menetapkan LKPJ APBD tahun 2014, lembaga dewan kini mulai membahas APBD Perubahan tahun 2015. Tahap awal pembahasan ini, lembaga dewan bakal memanggil seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Buleleng. Panggilan ini untuk membahas terkait proporsi tambahan anggaran yang akan dialokasikan kepada masing-masing SKPD untuk pertengahan tahun ini.

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/8) kemarin, Sekretaris DPRD Buleleng I Gede Wisnawa yang didampingi Kabag Humas dan Perjalan DPRD Buleleng Putra Ariyana mengatakan, rencananya empat komisi di DPRD Buleleng memanggil SKPD yang menjadi bidang tugasnya masing-masing. Panggilan ini awalnya mulai dilaksanakan kemarin, namun rencana itu terpaksa diundur. Pengun-

duran ini dilakukan karena pihak Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Buleleng akan menyusun jadwal ulang termasuk agenda pemanggilan seluruh SKPD ini. "Kalau jadwal lama pembahasan perubahan oleh komisi bersama SKPD mulai hari ini (kemarin-red), namun setelah koordinasi dengan pimpinan nanti akan dijadwalkan ulang oleh Bamus. Yang jelas, pembahasan perubahan ini dimulai tanggal 10 Agustus 2015 mendatang," katanya.

Menurut Wisnawa, pemerintah daerah telah mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang APBD Perubahan tahun 2015. Rancangan ini pun sudah didistribusikan ke masing-masing komisi yang ada. Dengan distribusi draf ranperda lebih awal tersebut, maka anggota komisi dapat mempelajari lebih awal terhadap susunan proporsi penambahan anggaran atau program yang akan

dijalankan pada pertengahan tahun 2015 ini.

Setelah memanggil SKPD, kata dia, dewan kemudian membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPASP tahun 2015 yang dilanjutkan dengan pembahasan antara Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah dua agenda ini, Bupati akan dijadwalkan melaporkan nota pengantar atas Ranperda APBD Perubahan 2015. Setelah disampaikan dengan resmi, dewan bersama eksekutif secara maraton membahas ranperda tersebut dan ditargetkan akhir Agustus ini sudah ditetapkan menjadi perda. "Drafnya sudah dikirim dan kami sudah sampaikan kepada komisi-komisi untuk dipelajari lebih awal. Catatan atau saran itulah nantinya akan dibahas ketika komisi memanggil semua SKPD secara terjadwal," tegasnya. (kmb38)

Edisi : Selasa, 4 Agustus 2015

Hal : II



Kasus Dermaga Gunaksa Tim Sembilan Terjerat karena Tanda Tangan

Semarapura (Bali Post) -

Dugaan bahwa Panitia Pengadaan Tanah atau Tim Sembilan tidak menerima keuntungan apa pun dalam kasus dugaan korupsi Dermaga Gunaksa, rupanya cukup kuat. Setidaknya hal itu diperkuat dari hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bahwa setiap rekening para terdakwa sama sekali tidak ditemukan transaksi mencurigakan.

Tim Sembilan terjerat hanya karena tanda tangan persetujuannya dalam penentuan harga tanah, yang menyebabkan negara mengalami kerugian cukup besar. "Dengan memberikan tanda tangan persetujuan ganti rugi, mereka turut serta membantu memperkaya orang lain. Ini juga masuk dalam unsur dugaan korupsi," terang Kajari Klungkung Totok Bambang Sapto Dwijo ditemui di ruangannya, Senin (3/8) kemarin.

Kajari sudah meneliti langsung isi temuan PPATK dan memastikan bahwa dari seluruh pejabat dan mantan pejabat di Tim Sembilan tidak ditemukan ada transaksi yang mencurigakan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Dermaga Gunaksa. Meski demikian, pihaknya tidak berani menjamin adanya bentuk keuntungan lain yang didapat saat itu. Misalnya, *fee* dalam bentuk uang tunai atau yang kini menjadi aset.

Penyidik juga tidak masuk melakukan penyelidikan hingga sejauh itu. Sebab, selama penyelidikan, pihaknya tidak melihat terdakwa

dari Tim Sembilan terlibat dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana kasus yang menjerat mantan bosnya terdakwa mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra. Tim Sembilan hanya dijerat dengan Pasal 3 dalam Undang-undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah ke dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002.

Para terdakwa di dalam Tim Sembilan sudah menjalani proses persidangan, baik sebagai terdakwa maupun saksi atas kasus yang menjerat mantan Bupati Klungkung Wayan Candra. Saat ini mereka masih ditahan di LP Gianyar.

Pejabat dan mantan pejabat di Tim Sembilan atau Panitia Pengadaan Tanah sesuai Keputusan Bupati Klungkung Nomor 261 Tahun 2007 antara lain Ketua Panitia Pengadaan Lahan/Sekda Klungkung Ketut Janapria, Wakil Ketua I Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Made Ngurah (sudah pensiun), Wakil Ketua II/Kepala Kantor Pertanahan AA Istri Agung Mastini (sudah pensiun), Sekretaris I/Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Gusti Ngurah Gede (sudah pensiun), dan Sekretaris II/Kabag Pemerintahan Gusti Ngurah Wiratmaja (sudah pensiun).

Sebagai anggota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum AA Ngurah Agung, Kepala Bappeda Made Sugiharta, Kepala Badan Pendapatan Nyoman Sukantra, dan Plt. Dinas Pertanian I Nyoman Rahayu. Kesembilan terdakwa sudah ditahan sejak 9 Desember tahun lalu, bertepatan dengan Hari Antikorupsi. (kmb31)

Edisi : Selasa, 4 Agustus 2015

Hal : 10



Kasus GOR Nusa Penida

Kejari Klungkung

Tetapkan

Dua Tersangka

Semarapura (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung akhirnya menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan GOR di Banjar Dinas Sampalan, Desa Batununggul, Nusa Penida. Kejaksaan menolak menyebut nama para tersangka, namun keduanya dipastikan bertindak sebagai pimpinan proyek (pimpro) dan pihak perencana.

Kejari Klungkung Totok Bambang Sapto Dwijo ditemui di kantornya, Senin (3/8) kemarin, mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Kejari Klungkung melakukan gelar perkara akhir Juli lalu. Setelah dipastikan ada dua alat bukti yang cukup, dua orang PNS aktif di lingkungan Pemkab Klungkung itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, keduanya sudah pernah menjalani beberapa kali pemeriksaan sejak dimulainya penyelidikan pada awal Januari lalu.

Ketika kasusnya sudah meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan, kerugian negara sementara ditaksir mencapai Rp 1 miliar lebih. Guna memastikan jumlah riil kerugian negara, pihaknya bakal bekerja sama dengan seorang ahli Dr. Sugeng P Budio dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang. "Nilai kerugian negara, nanti ditentukan dari keterangan ahli ini," katanya.

Kajari memastikan kasus

ini tidak berhenti pada dua tersangka. Kasusnya masih terus dikembangkan. Bahkan, berpotensi bertambah dua tersangka baru dari pihak-pihak yang diduga terlibat. "Sekarang baru dua, kemungkinan tersangkanya ada empat," terangnya.

Saat ini kedua tersangka belum ditahan, karena dinilai masih kooperatif menjalani pemeriksaan. Selama ini tersangka juga tidak ada upaya menghilangkan barang bukti. Sekarang keduanya masih aktif memenuhi kewajibannya sebagai PNS. Mereka hanya dilarang pergi ke luar kota alias dicekal.

Kejaksaan masih merahasiakan pasal yang disangkakan kepada tersangka. Apakah ada unsur *mark-up* dalam kasus ini, atau dugaan korupsi murni, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2002 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Untuk diketahui, pembangunan GOR itu sudah menghabiskan total anggaran Rp

2,3 miliar. Dana antara lain bersumber dari APBN dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2009 Rp 1,5 miliar, kemudian tahun 2010 dari APBD Provinsi Bali Rp 200 juta, APBD Kabupaten Rp 65 juta, dan APBD Perubahan Rp 500 juta. Pembangunannya dilakukan secara swakelola. Seluruh panitia pembangunan GOR, sesuai dengan surat keputusan Camat Nusa Penida Nomor 001.01/01 SD 5/2009, tanggal 6 April 2009, antara lain sebagai penanggung jawab sekaligus pimpinan proyek (pimpro) Camat Nusa Penida saat itu I Made Sudiarkajaya, Ketua KUPT Disdikpora kala itu I Ketut Wiadnya.

Kemudian, Sekretaris Dewa Gede Suamba (unsur pendidik), Bendahara Wayan Karnata (unsur PGRI), I Ketut Sukla (unsur kecamatan). Sebagai anggota dari berbagai tokoh masyarakat Nusa Penida, di antaranya I Komang Sumendra, Wayan Misna, Wayan Supartawan, Made Kastika, Wayan Sutarna, dan Made Sukarta. (kmb31)

Edisi : Selasa, 4 Agustus 2015

Hal : 10



Tembus Rp 4 Triliun Belanja Badung 2015 Melonjak hingga Rp 500 M

DIBANDINGKAN dengan APBD Induk 2015, pada perubahan APBD, anggaran belanja melonjak hingga Rp 500 miliar. Pada APBD Induk 2015, belanja dipasang Rp 3,5 triliun, sementara pada APBD Perubahan 2015, anggaran belanja mencapai Rp 4 triliun. Lonjakan ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunartha. "Kenaikan ini sangat signifikan," ujarnya.

Walau begitu, Koordinator Banggar DPRD Badung itu mengingatkan kenaikan belanja tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat jika digunakan untuk membiayai program-program yang memang dibutuhkan masyarakat. Dia menunjuk program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan UMKM.

Dia memastikan, penyerapan belanja Badung secara maksimal akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Karena itu, kami berharap anggaran belanja tersebut minimal bisa terserap 90 persen," tegas politisi Demokrat asal Abianbase.

Selain kenaikan belanja hingga Rp 500 miliar, kata Sunartha, Badung juga memiliki sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) hingga Rp 192 miliar lebih. Silpa ini akan dialokasikan pada 2016 mendatang.

Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD 2014, katanya, realisasi pendapatan setelah perubahan senilai Rp 3,4 triliun dari target Rp 3,1 triliun. Pendapatan ini menembus 109,64 persen.

Untuk belanja daerah, tegasnya, mencapai Rp 3,2 triliun dari target Rp 3,6 triliun. Belanja daerah hanya menembus 90,65 persen. Yang menarik, silpa pada 2014 menembus angka Rp 923 miliar. Silpa ini telah dianggarkan pada 2015 dan 2016 mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Sunartha juga memastikan DPRD menyepakati Rancangan KUA dan PPAS tahun

anggaran 2016. Selanjutnya, Rancangan KUPA dan PPAS tahun anggaran 2015, setelah dibahas, mengalami perubahan baik mengenai program kegiatan maupun nilainya. Dewan pun menyepakati dan menetapkan menjadi KUPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2015.

Tiga hal yang mengalami peningkatan pada rancangan APBD dari induk 2015 yakni pendapatan meningkat Rp 368 miliar, belanja meningkat Rp 523 miliar dan pembiayaan netto meningkat Rp 347 juta. (ad232)



Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunartha.

Edisi : Selasa, 4 Agustus 2015

Hal : 5